

**EFEKTIVITAS JOINT PRESS STATEMENT DALAM MENANGGULANGI
ANCAMAN ABU SAYYAF DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA**

By:

M. Herry Misya

Email: muhammadherrymisya@yahoo.com

Supervisor: Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Departement of International Relations – International Relations

Faculty of Social and Political Sciences

University of Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Telp/Fax: 0761-63272

Abstract

This research is a security study that provides an analysis of the problem of overcoming the problem of hostage taking by the Abu Sayyaf Group at the Indonesia-Philippines border through the Joint Press Statement Forum as a forum of cooperation between Indonesia and the Philippines.

This research uses a conceptual foundation, applying the national interest concept of program implementation to see how much of its influence in the effort to save the Indonesian citizen hostage by the Abu Sayyaf Group on the Indonesia-Philippines border by focusing on a particular region. Supported by the theory of international cooperation. The concept leads to qualitative methods and literature study as a source of information.

Some of Indonesia's effort in overcoming the core problem is to monitor the forum until all citizens are free from hostage by Abu Sayyaf. So far these efforts have provided poor results to government of Indonesia because the Philippines has not given direct rights to Indonesia to directly diplomate with the Abu Sayyaf.

Keywords: Abu Sayyaf, Terorism, International Cooperation, Indonesia-Philippines

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan studi yang mengangkat salah satu aspek kerjasama internasional dalam menanggulangi salah satu kejahatan transnasional diperbatasan Indonesia dan Filipina. Penelitian ini menarik diangkat karena upaya pengawasan kejahatan transnasional khususnya teroris yang telah menjadi salah satu masalah keamanan yang diperhatikan oleh banyak Negara di Asia Tenggara.

Penelitian ini terutama mengangkat pelaksanaan *Joint Press Statement* yang melibatkan dua Negara pantai yaitu Indonesia dan Filipina untuk merealisasikan pertemuan ke3 dari *Memorandum of Understanding on the Establishment of a Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC)* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina yang dibentuk pada tahun 1993. Pelaksanaan *Joint Press Statement* ditandatangani pada 21 juni 2005 di Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan yang terjadi diperbatasan antara Indonesia dan Filipina.

Filipina adalah Negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang yakni 36.289 km. Sementara itu Filipina hanya memiliki sedikit luas wilayah daratan, yaitu mencapai 30.000 km persegi.¹ Karena merupakan sebuah Negara kepulauan, Filipina tidak memiliki perbatasan darat, dan akses keluar masuk di Filipina di dominasi oleh jalur maritim. Sehingga Filipina memiliki permasalahan yang serupa seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu tantangan mengenai wilayah perbatasan yang seringkali digunakan sebagai pintu masuk teroris dan penyelundupan senjata.

Kondisi kawasan Filipina saat ini juga penuh dengan ancaman dan tantangan keamanan yang bersumber dari aktor Negara maupun non Negara. Ancaman yang secara umum berasal dari aktor

Negara seperti sengketa perbatasan antar Negara yang belum terselesaikan, perlombaan senjata Angkatan Laut (*naval arms race*) dan masalah kebebasan penggunaan laut. Sedangkan ancaman yang muncul dari aktor non Negara tidak dapat dibatasi pada kesenjataan dan moral, seperti perompakan, pembajakan, terorisme, maritim, proliferasi senjata pemusnah massal dan pencurian sumber daya laut. Serta kejahatan di maritim kini telah menjadi perhatian semua Negara di kawasan, karena dipandang dapat mengancam stabilitas kawasan.

Konflik dapat dipicu oleh beragam faktor, seperti perbedaan paham dan faktor sejarah. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya mendorong pihak pemberontak untuk melakukan pemberontakan dengan berbagai macam tujuan, seperti:

1. Menggulingkan pemerintah resmi dan kemudian menggantikannya dengan pemerintah yang baru sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak pemberontak.
2. Memisahkan diri dari Negara induk, untuk kemudian membentuk Negara sendiri.
3. Menggabungkan diri dengan Negara lain.
4. Menuntut adanya otonom yang lebih luas.

Kedua faktor penyebab terjadi nya konflik yang telah disebutkan diatas, itulah yang turut menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di bagian selatan Filipina, tepatnya di daerah Mindanao dan Sulu. Bermula dari adanya perbedaan sejarah, yaitu kesalahpahaman antara penjajah Amerika Serikat dengan Spanyol dalam memperlakukan daerah tersebut, kini meluas kepada masalah perbedaan budaya dan agama. Keadaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan bangsa Moro sebagai penduduk asli Mindanao dan Sulu menuntut hak nya kepada pemerintah Filipina melalui

¹Leandro R. Mendoza "Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting"

www.apectptwg.org.cn/.../Transportation%20Security%20Philippines diakses pada 8 september 2016

berbagai usaha, baik dengan cara *soft power* maupun *hard power*.

Pada mulanya Filipina pada merupakan jajahan dari Spanyol. Ketika bangsa ini tiba di Filipina, mereka langsung menguasai Filipina bagian utara. Awalnya bangsa ini datang dengan tujuan melakukan penjajahan dan berdagang. Namun ternyata, Spanyol juga melakukan penyebaran agama (kristenisasi) pada setiap wilayah yang mereka duduki termasuk Filipina ini. Ketika Spanyol hendak menguasai bagian selatan Filipina, mereka mengalami kesulitan. Sebab di daerah ini terdapat sebuah kesultanan yang berbau kerajaan islam. Tentu hal ini bertolak belakang dengan misi bangsa Spanyol untuk menyebarkan agama Kristen diwilayah tersebut.

Mindanao dan Sulu merupakan wilayah yang berada dikawasan kepulauan Filipina. Di wilayah ini terdapat sebuah kerajaan yang independen bagi penduduk asli setempat. Agama Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-8 masehi melalui para pedagang. Dan pada pada abad ke-14, Islam berkembang diwilayah ini serta diterima oleh penduduk asli setempat. Sekitar tahun 1565, Bangsa Spanyol akhirnya tiba diwilayah selatan Pulau Mindanao dan kepulauan Sulu. Akibat misi Bangsa Spanyol tentang penyebaran agama Kristen bertentangan dengan keadaan di dua wilayah ini, akhirnya Bangsa Spanyol melakukan penyerangan. Bangsa Spanyol menyebut penduduk asli Mindanao sebagai bangsa Moro. Kata Moro diambil dari "*Moors*", yang artinya adalah seorang yang pernah dikuasai Spanyol.²

Pada Abad ke-19, akhirnya Kesultanan Mindanao mengizinkan Bangsa Spanyol untuk memasuki wilayah bagian utara pulau Mindanao untuk melakukan usaha bisnis. Tetapi Bangsa Spanyol melanggar ketentuan yang diberikan Kesultanan Mindanao. Bangsa Spanyol melakukan migrasi besar-besaran warga

Kristen ke wilayah Mindanao dan Sulu. Sehingga pada akhirnya, bangsa Spanyol berhasil menguasai secara penuh kawasan kepulauan Filipina serta berhasil merubah penduduk lokal dan melakukan misi kristenisasi (*catholicism*). Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksenangan penduduk Mindanao dan Sulu yang pada mulanya bermayoritaskan agama Islam.

Tahun 1898, Amerika Serikat memenangkan Spanyol. Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat. Demikian juga Mindanao dan Sulu yang saat itu belum resmi menjadi wilayah jajahan Spanyol, juga turut diserahkan kepada pihak Amerika Serikat. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertumpahan darah antara Bangsa Moro (Muslim Mindanao) dengan Amerika Serikat. Pertumpahan darah tersebut akhirnya berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Mindanao dengan Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dikenal dengan "*Treaty Bates*", yang diprakarsai pada 22 Agustus 1899. Namun sayangnya, perjanjian ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1902, secara tiba-tiba Amerika Serikat menetapkan wilayah Mindanao sebagai salah satu wilayah yang masuk ke dalam pembentukan wilayah Filipina.

Permasalahan keamanan yang terjadi di daerah Filipina Selatan, dimana di daerah tersebut terdapat gerakan *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang berusaha memisahkan diri dari Filipina yaitu Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf Group merupakan sebuah kelompok militan yang beroperasi di Filipina Selatan dan mempromosikan pendirian sebagai suatu Negara Islam yang merdeka di Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group berdiri pada awal tahun 1990-an. Abu Sayyaf Group terlibat dalam berbagai tindak kekerasan seperti pemboman, penculikan,

²Syed Sirajul Islam, *The Politics of Islamic identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson Learning, 2005, hal. 28.

pembunuhan, dan pemerasan. Pada tahun 2016 Abu Sayyaf menyandera 7 WNI di perairan Malaysia dan membebaskan 4 dari 7 WNI.³

KERANGKA DASAR TEORI

Sebelum menjelaskan teori, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai tingkat analisa dan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini.

Tingkat analisa Peneliti menggunakan tingkat analisa Negara Bangsa (*Nation State*). Asumsi dari tingkat analisis Negara bangsa menurut Patrick Morgan ialah Negara bangsa merupakan faktor penentu dalam hubungan internasional, dan setiap pembuat keputusan dimanapun berada pada dasarnya berlaku sama apabila menghadapi situasi yang sama.⁴

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif Neo-Realis. Dalam perspektif neo-realis, *pertama*, sistem internasional bersifat anarki, karena tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan tata tertib. *Kedua*, dalam sistem yang demikian, kepentingan utama Negara adalah keberlangsungannya sendiri, sehingga Negara akan memaksimalkan *power* mereka khususnya kekuatan militer. Karena *power* tersebut bersifat *zero-sum*, Negara menjadi ‘posisional defensif’, sehingga *struggle for power* adalah karakteristik permanen hubungan internasional dan konflik bersifat endemik.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara-Negara berkembang yang terdapat di Asia tenggara adalah kawasan yang belum memiliki kestabilan, secara garis besar kawasan tersebut belum memiliki kestabilan tersebut terdapat didalam konteks politik, ekonomi, dan keamanan. Ketidakstabilan menyebabkan Negara-Negara berkembang lebih rentan terhadap ancaman yang datang dari luar

maupun dalam negeri. Indonesia dan Filipina merupakan dua Negara kepulauan dan juga merupakan dua Negara berkembang yang terdapat di Asia tenggara. Kedua Negara yang dari segi geografis ini saling berbatasan memiliki sebuah kemiripan yaitu masih seringnya terjadi konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Tidak hanya itu kedua Negara ini terdapat kelompok radikal yang memiliki keterkaitan satu sama lain dapat mengancam kedaulatan mereka. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kedua Negara melakukan pendekatan dengan cara membentuk kerjasama bilateral dalam bidang keamanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kawasan yang stabil dan aman.

Didalam bab ini akan dibahas upaya-upaya Indonesia dan Filipina untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya ancaman-ancaman yang bersifat radikal dan mengancam kedaulatan Negara, dimana upaya tersebut di bina sebaik mungkin oleh kedua Negara untuk mengatasi ancaman yang terjadi dilintas batas kedua Negara khususnya dalam bidang keamanan yang dilakukan pada kerjasama tahun 2005.

Kurangnya Koordinasi Antara Indonesia-Filipina Dalam Upaya Pembebasan Sandera.

Sistem Keamanan Nasional yang dikembangkan di Indonesia saat ini masih bersifat statis dan permanen dengan menempatkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*) sebagai satu-satunya sistem dan sekaligus doktrin pertahanan Negara. Seharusnya, sistem pertahanan nasional bersifat dinamis dan harus memberikan ruang lingkup yang cukup bagi Negara untuk mengembangkan strategi, kebijakan dan kemampuan pertahanan yang memadai. Selain itu,

³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160711_indonesia_panglimatni_abusayyaf diakses pada tanggal 8 september 2016

⁴*Ibid.* hal. 41

⁵M. Saeri, “Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik”. Jurnal Transnasional, Vol.3, No.2, Februari 2012.halaman. 15-16

pendekatannya pun tidak bisa hanya terfokus pada keamanan Negara. Karena Negara sebagai aktor keamanan utama tidak hanya memperhatikan isu-isu keamanan tradisional yang mengancam kedaulatan politik dan territorial Negara, tetapi juga isu-isu keamanan yang bersifat non-konvensional yang mengancam kedadwipan warga Negara.

Sistem keamanan nasional dalam tingkat operasional dipisahkan kedalam dua sub sistem yakni sistem pertahanan Negara dan system keamanan dalam negeri. Kedua sistem ini bergerak dengan aturannya masing-masing, sistem pertahanan Negara diatur dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sedangkan sistem keamanan dalam negeri diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Padahal dalam kenyataannya, suatu ancaman tidak dapat dengan mudah dipisahkan secara hitam putih. Hal inilah yang tidak diantisipasi oleh TAP MPR No. VI dan VII tahun 2000. Kedua TAP MPR tersebut hanya memisahkan sistem pertahanan Negara dan sistem keamanan dalam negeri secara institusional, namun tidak secara fungsional maupun kewenangan. Kerumitan ini diperparah dengan munculnya UU No. 34 Tahun 2004 yang mengatur tentang TNI. Pengaturan dalam UU ini tidak menjelaskan secara lebih rinci, bahkan justru menimbulkan “daerah abu-abu” dengan UU No. 2 Tahun 2002. Daerah abu-abu tersebut muncul berkaitan dengan peran dan kewenangan TNI Polri, terutama yang berkaitan dengan kewenangan kedua institusi dalam penanganan bencana, penanganan kelompok separatis, terorisme serta penanganan wilayah laut dan udara.⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat digeneralisasi tiga kesimpulan utama yakni: kewenangan yang tidak jelas antara TNI-Polri, tidak ada koordinasi yang sistematis dan menyeluruh antar aktor dan yang terakhir ialah kewenangan dan aktor yang

terbatas dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

Pembagian kewenangan yang tidak jelas pun terjadi di sektor penanggulangan teror, ketidakjelasan pembagian peran dan wewenang membuat upaya penanggulangan teror menjadi kurang efektif. TNI maupun Polri sama-sama memiliki legitimasi untuk ikut berperan dalam operasi penanggulangan teror dan keduanya pun memiliki unit anti teror yang mumpuni namun permasalahannya hingga saat ini belum ada mekanisme yang jelas mengenai pembagian peran dan bagaimana prosedur perbantuan, apa parameter yang menandai inkapabilitas Polri sehingga harus meminta bantuan kepada TNI dan sebagainya. Ketidakjelasan ini memberikan dampak yang tidak baik terutama di level operasional.

Pemerintah melalui Dephan telah berupaya mengkategorisasikan penyelenggaraan keamanan insani, keamanan publik, keamanan Negara dan pertahanan Negara kedalam lima status keadaan, yaitu tertib sipil, darurat bencana, darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Kelima kategori tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Wewenang TNI dan Polri

	Polri	TNI
WAR (Darurat perang)	Menjalankan fungsi kepolisian, tidak diperbantukan, tidak dimobilisasi menjadi kombatan	Kontrol kendali KoOps dibawah PP pusat
CONFLICT (Darurat Militer)	Menjalankan fungsi kepolisian, tidak	Kontrol KoOps dibawah PDM pusat

⁶M.Riefqi Muna, “Grey Areas, Kewenangan dan Peran Politik Elit”, Jakarta”ProPatria Institute, 31 mei 2017

	diperbantukan	
CRISIS (Darurat Sipil)	Kontrol kendali KoOps dibawah PDS. Memberikan kendali KoOps kepada TNI apabila situasi sudah tidak mampu dikendalikan lagi	Perbantuan dengan permintaan langsung dari presiden. Mengambil alih koOps Polisi dan tidak diperbantukan ke Polisi
PEACE (Tertib Sipil)	Menjalankan fungsi kepolisian	Di bawah komando KoOps

Penanganan kegiatan teror jika kita masukan kedalam kategorisasi diatas maka akan masuk kedalam kategori tertib sipil dimana penyelenggaraan fungsi keamanan publik dilaksanakan oleh setiap unsur pemerintahan secara fungsional di bawah tanggung jawab menteri yang membidangi urusan dalam negeri.⁷ Penyelenggaraan fungsi keamanan dan kestabilan ditujukan untuk menjamin ketentraman, keamanan dan kestabilan di dalam negeri.⁸ Penyelenggaraan fungsi keamanan publik pada keadaan tertib sipil dilaksanakan melalui usaha-usaha keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengayoman masyarakat dan pelayanan masyarakat.⁹ Lembaga pemerintah lain yang bukan pelaksana fungsi keamanan publik dapat dilibatkan sesuai dengan tugas fungsinya.¹⁰

Fungsi TNI terkait penanganan terorisme ialah wajib mengambil langkah-langkah konkrit yang ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kehormatan bangsa dan dilaksanakan dalam tahap pencegahan, penindakan dan pemulihan.¹¹

Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan penanganan terorisme, TNI wajib meningkatkan kemampuan satuan-satuan khususnya dalam penanggulangan terorisme.¹² Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, TNI bekerja sama dengan unsur-unsur keamanan nasional lainnya.¹³

Melibatkan TNI dalam penanggulangan teror harus melalui mekanisme permintaan bantuan dari Polri kepada Pemerintah Daerah yang kemudian akan ditembuskan ke Pemerintah Pusat yang kemudian akan menentukan apakah TNI perlu digerakkan atau tidak, mekanisme birokrasi yang panjang ini disebabkan karena ranah teror masih berada dalam cakupan tertib sipil yang menjadi domain Polri. Dalam penulisan tesis ini penulis ingin mencoba mencari tahu apakah mungkin TNI dapat terlibat langsung dalam upaya pemberantasan terorisme melalui konsep perluasan agenda keamanan yang akan mensekritisasi isu terorisme sehingga TNI dapat berperan aktif dalam upaya penanggulangan teror sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat 2 terkait dengan Operasi Militer Selain Perang.

Koordinasi merefleksikan bahwa ancaman teror merupakan ancaman yang melintasi batas yurisdiksi satu departemen bahkan Negara. Upaya untuk menanggulangnya pun harus melintasi batas yurisdiksi yang dimiliki tiap-tiap departemen oleh karena itu koordinasi menjadi sangat penting dalam memerangi terorisme. Pemerintah Indonesia pada era presiden Megawati mengeluarkan mandat bagi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan untuk menjadi coordinator yang menangani masalah terorisme. Koordinator ini tidak akan mengambil alih semua wewenang namun hanya bertugas untuk mensinkronisasikan saja, membuatnya menjadi lebih efisien, efektif dan lebih terfokus pada target yang telah ditentukan.

⁷RUU Kamnas pasal 17 ayat 1

⁸*Ibid*, Penjelasan Pasal 17 ayat 1

⁹*Ibid* Pasal 21 ayat 3

¹⁰*Ibid* Pasal 21 ayat 4

¹¹*Ibid* Pasal 56 ayat 1 dan ayat 2

¹²*Ibid* Pasal 57 ayat 1

¹³*Ibid* Pasal 57 ayat 2

Upaya Pembebasan Sandera

Menteri Luar Negeri RI telah menempatkan isu perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai prioritas utama dalam agenda kerjanya sebagai bagian dari implementasi sembilan agenda kerja Presiden Joko Widodo (Nawacita). Dalam pelaksanaannya, perlindungan WNI telah dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait. Indonesia mengedepankan *soft power* dengan negosiasi minim korban jiwa dan biaya. Dalam hal ini, sebagai sesama Negara ASEAN, pendekatan politik sejak mula telah dikedepankan Pemerintah Indonesia dengan melakukan koordinasi dengan Filipina dan Malaysia.

Jalur Diplomasi

Pemerintah Filipina beranggapan pembajakan ini merupakan upaya pengalihan yang dilakukan simpatisan Abu Sayyaf, karena kelompok tersebut telah terdesak. Sejalan dengan Indonesia, Filipina menolak tegas negosiasi atau membayar tebusan demi membebaskan sandera. Menteri Luar Negeri Indonesia telah datang ke Filipina. Pemerintah Indonesia terus memaksimalkan lobi, baik formal maupun informal, agar ada jalan keluar terbaik. Secara resmi kedua Negara terus berkoordinasi untuk mencari opsi terbaik bagi pembebasan sandera. Selain dengan Filipina, Menteri Luar Negeri Indonesia juga membuka komunikasi dengan Malaysia. Indonesia meminta kerja sama dengan Malaysia jika sewaktu-waktu diperlukan dan Pemerintah Malaysia menyatakan kesanggupan untuk bekerja sama jika ada perubahan situasi yang memerlukan bantuan dari Indonesia.¹⁴

Di lain sisi, pendekatan informal juga harus lebih diperkuat. Secara informal Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan kemanusiaan sebagai sesama muslim dengan mengerahkan tokoh-tokoh agama, kekerabatan melalui jalur historis

tradisional bekas Kesultanan Sulu dan jalur informal lainnya yang memungkinkan.

Dalam upaya pembebasan sandera terdapat 2 opsi, yaitu opsi militer dan pembayaran tebusan. Perompakan memiliki dimensi geopolitik yang cukup besar, karena tidak hanya menyangkut kepentingan satu Negara saja, melainkan banyak Negara, baik itu Negara pemilik kapal, Negara asal ABK, Negara pemilik barang, Negara tujuan barang, maupun Negara tempat aksi perompakan berlangsung. Memastikan kepentingan setiap pihak terjaga adalah salah satu persoalan yang harus bisa dikelola dengan baik dalam rangka manajemen krisis pembajakan. Kunci pembebasan sandera ada di tangan para negosiator sehingga komunikasi sebaiknya dibuat satu pintu. Keluarga korban, perusahaan pemilik kapal, dan pihak-pihak terkait lainnya dilarang berkomunikasi langsung dengan penyandera. Alasannya, mereka akan mudah diintimidasi dan dipengaruhi sehingga menguatkan posisi penyandera. Seperti dalam kasus MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011, di luar kendali Pemerintah Indonesia, pemilik kapal dan pemilik barang membayar tebusan yang diminta perompak. Hal ini sedikit banyak telah mencederai kehendak Indonesia untuk tidak berkompromi terhadap aksi-aksi yang mengancam WNI.¹⁵

Opsi Pembayaran Tebusan

Pemerintah menilai pembayaran tebusan sebagai salah satu strategi untuk membebaskan sandera. Namun, Pemerintah Indonesia juga menegaskan tidak akan menempuh opsi pembayaran uang tebusan. Rencana pembayaran tebusan merupakan hasil komunikasi langsung antara perusahaan dengan pihak penyandera. Pemerintah akan memantau dengan cermat perkembangannya. PT Patria Maritime Line, pemilik kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12,

¹⁴<http://jakartagreater.com/indonesia-dan-malaysia-bekerja-sama-bebaskan-sandera-dari-kelompok-abu-sayyaf/> diakses pada 20 juli 2017

¹⁵<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/19441531/luhut.negosiasi.jadi.opsi.terbaik.pembebasan.sandera.di.Filipina> diakses pada 20 juli 2017

disebut siap membayar tebusan demi kebebasan 10 ABK. Meski demikian, PT United Tractors sebagai induk perusahaan PT Maritime Line menolak memberi jawaban tegas mengenai kebenaran berita tersebut dan siap berkoordinasi dengan pemerintah. Opsi pembayaran uang tebusan didukung oleh kelompok peduli HAM. Pemerintah diminta untuk tidak mempertaruhkan keselamatan atau hak hidup warganya karena berpendapat nilai nyawa lebih besar dari besaran jumlah uang yang dikeluarkan Negara.¹⁶

Opsi Pembebasan oleh Militer

Pembayaran uang tebusan belum memberi jaminan bahwa sandera pasti dibebaskan. Opsi ini juga merendahkan harga diri bangsa karena berarti menyerah pada tuntutan terorisme. Opsi ini akan menjadi preseden buruk di mata internasional bahwa Negara toleran terhadap aksi terorisme dan memperkuat basis finansial kelompok tersebut. Pembayaran tebusan juga akan menginspirasi aksi terror serupa di masa depan. Dengan pemikiran tersebut Pemerintah harus menyiapkan opsi kedua, yaitu pembebasan sandera dengan kekuatan militer.

Pendekatan keamanan dengan operasi militer untuk pembebasan baru akan dilakukan pada fase berikutnya jika situasi membutuhkan. Militer Indonesia memiliki pengalaman dalam pembebasan warganya dalam kasus penyanderaan di sejumlah Negara. Salah satu yang dinilai berhasil adalah pembebasan WNI dari kelompok bersenjata di Bangkok, Thailand tahun 1981. Pendekatan berbeda dilakukan Indonesia ketika membebaskan WNI dari kelompok bersenjata di PNG pada September 2015 dan pembajakan kapal MV Sinar Kudus di Somalia tahun 2011. Namun demikian pola pendekatan pembebasan WNI yang dilakukan pemerintah berbeda-beda.

Tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Konteks politik pembajakan MV Sinar Kudus di Somalia dengan Brahma 12 di Filipina sangat berbeda. Somalia termasuk kategori Negara gagal dengan pemerintahan nasional yang bisa dikatakan tidak berfungsi. Sedangkan Filipina Negara berdaulat dan juga merupakan anggota ASEAN. Indonesia telah menyiapkan pasukan khusus dengan 500 personil dari setiap matra di Tarakan, Kalimantan Utara. Namun Konstitusi Filipina tidak mengizinkan militer asing masuk wilayahnya tanpa ada perjanjian, sehingga pasukan militer Indonesia tidak mendapat izin untuk masuk melakukan operasi penyelamatan. Indonesia hanya diijinkan melakukan asistensi lewat perwira pasukan khusus. Upaya penyelamatan sandera Abu Sayyaf memengaruhi kredibilitas Filipina di dunia internasional, Negara tersebut meminta Indonesia mempercayakan persoalan ini kepada pihaknya.

Terhambatnya Implementasi *Joint Press Statement*.

Sebagai landasan hukum yang menjadi fondasi kontra terorisme kelompok Abu Sayaf di Filipina dan dengan bantuan militer Indonesia, JPS sendiri secara statuta tidak memiliki ketegasan yang kuat agar lebih mementingkan hasil kontra terorismenya. Diperlukannya ketegasan dalam sebuah perjanjian seperti ini dikarenakan tingkat permasalahan yang dihadapi yaitu terkait HAM, keamanan regional, dan kontra terorisme.

Faktor keterhambatannya sendiri adalah Filipina masih mengedepankan asas hukum nasional dalam penanggulangan kasus ini sebagaimana dalam Nota Kesepahaman (MoU) JPS itu sendiri pada pasal 2,¹⁷ yaitu dalam melaksanakannya harus sesuai dengan amanat hukum nasional masing-masing sehingga terhenti dalam pemberian akses langsung bagi Indonesia dalam melakukan kontak

¹⁶<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/18115141/Luhut.Pemilik.Kapal.yang.Dibajak.Sedang.Berunding>. Diakses pada 20 juli 2017

¹⁷Nota Kesepahaman BNPT RI-Dewan Anti Terorisme Republik Filipina. Pasal 2.

langsung dalam penanganannya. Meskipun pada akhirnya Indonesia berhasil membebaskan WNI yang disandera Kelompok Abu Sayyaf, namun itu memerlukan waktu selama lima tahun sehingga efektivitas JPS diragukan.

Dengan demikian, kinerja dari sebuah perjanjian dalam menangani ASG dapat dikatakan kurang karena beberapa hal;

Perlunya waktu yang lama dalam membebaskan sandera.

26 Maret 2016

Dua kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.¹⁸

29 Maret

Polri dan TNI melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat. Tiga pasukan elite yang diterjunkan untuk membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.¹⁹

31 Maret

Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) melakukan operasi pembebasan sandera asal Indonesia yang kini ditawan militan Abu Sayyaf, masih bisa mereka tangani sendiri. Dengan begitu, tawaran bantuan militer Indonesia yang sekarang sudah menyiagakan armada tempur di Tarakan serta Bitung, ditolak secara halus. Militer

Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera tersebut.²⁰

8 April

Umar Patek siap membantu pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Terpidana kasus terorisme 20 tahun bui itu pun mengaku tanpa pamrih apapun, asalkan persyaratan secara teknis dipenuhi. Umar Patek alias Hisyam bin Alizein merupakan asisten koordinator lapangan dalam aksi terorisme Bom Bali Pertama pada tahun 2002. Insiden itu menewaskan 202 orang. Umar Patek disebut-sebut pernah membekali para petinggi militan Abu Sayyaf saat ini dengan pelatihan menggunakan senjata api serta merakit bom.²¹

15 April

kapal berbendera Indonesia, yaitu kapal tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia-Filipina kembali dibajak. Kapal tersebut dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan. Kapal membawa 10 orang ABK WNI. Dalam pembajakan kali ini, seorang ABK tertembak. Sementara itu, lima orang berhasil selamat, sedangkan empat lainnya diculik oleh kelompok tersebut.²²

29 April

Brigadir Jenderal Alan Arrojado yang selama delapan bulan terakhir memimpin Brigade 501 Provinsi Sulu dicopot. Dia digantikan oleh Kolonel Jose Faustino selepas satu sandera asal Kanada dipenggal oleh militan Abu Sayyaf di Pulau Jolo. Arrojado kabarnya bersitegang melawan atasannya, Mayor Jenderal Gerrardo Barrientos. Mereka adu pendapat

¹⁸http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_kapal_dibajak_Filipina diakses pada 20 juli 2017

¹⁹<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kemampuan-3-pasukan-elite-tni-buat-bebaskan-sandera-di-Filipina.html> diakses pada 20 juli 2017

²⁰<http://newsinfo.inquirer.net/590576/abu-sayyaf-men-abduct-school-principal-in-basilan> diakses pada 20 juli 2017

²¹<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/04/09/o5cy8a1-umar-patek-dikabarkan-ikut-melobi-abu-sayyaf> diakses pada 20 juli 2017

²²<https://nasional.sindonews.com/read/1101574/14/kapal-indonesia-kembali-dibajak-ini-kata-menkoplhukam-1460791002> diakses pada 20 juli 2017

soal strategi menekan militan, terkait operasi pembebasan para sandera.²³

1 Mei

10 ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di daerah Sul Polisi wilayah Provinsi Sulu, mengonfirmasi perihal pembebasan sandera. Pemerintah Indonesia memastikan 10 WNI tiba di Indonesia, namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf.²⁴

Masih beradanya Kelompok Abu Sayyaf.

Keberadaan Abu Sayyaf tak lepas dari sejarah Moro National Liberation Front (MNLF). Organisasi tersebut merupakan gerakan yang menuntut kemerdekaan dari pemerintah [Filipina](#), guna mendirikan Negara Islam di Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group didirikan sekitar tahun 1990 oleh abdurajak abubakar janjalani, yang makin radikal setelah berpergian ke Negara-Negara Timur Tengah. Tahun 1988, Janjalani dilaporkan berjumpa Osama bin Laden di Pakistan dan berjuang bersama melawan invasi Soviet di Afghanistan. Setelah itu, janjalani mulai mengembangkan misinya untuk mengubah Filipina selatan menjadi Negara Islam. situasi politik menjadi berubah saat pemerintah Filipina bernegosiasi dengan MNLF pada 1975. Dari pertemuan itu, lahir persetujuan yang diteken pada 23 Desember 1976. Persetujuan yang dinamakan kesepakatan Tripoli itu menyatakan adanya otonomi khusus bagi MNLF di wilayah Filipina Selatan. Daerah tersebut adalah mencakup 13 provinsi. Yaitu Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato utara, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao Norte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato selatan, dan Palawan. Selain

itu, otonomi penuh juga diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan. Sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap menjadi wewenang pemerintahan pusat di Manila.²⁵

Masih beraktivitasnya Kelompok Abu Sayyaf.

Abu Sayyaf Group menerima bantuan logistik dan mempunyai hubungan baik dengan kelompok radikal yang berada di dunia internasional seperti Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah. Para pengamat terorisme menilai Abu Sayyaf telah jauh meninggalkan ideologi agama Islam yang pada awalnya mereka melakukan tindak kekerasan dan menjadi kelompok radikal yang melakukan tindakan kriminal tanpa alasan politik yang jelas. Hingga saat ini Abu Sayyaf tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan khususnya di Filipina dan beberapa Negara di Asia Tenggara.²⁶

Tidak adanya langkah *hard diplomacy* yang kongkret dalam memberantas Kelompok Abu Sayyaf.

Negosiasi adalah suatu proses dimana para pihak yang terlibat dalam hubungan timbal balik memutuskan apakah masing-masing pihak akan memberi dan menerima suatu perubahan, yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda, hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang melalui tahapan seperti pengenalan, pertukaran informasi, penyampaian tawaran, proses kesepakatan, perumusan kesepakatan, dan implementasi. Sejalan dengan hal tersebut Robbins (2006) menyatakan bahwa perundingan adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih bertukar barang atau jasa dan berupaya menyepakati nilai tukar untuk barang dan jasa tersebut.

²³<https://jakartagreater.com/jenderal-Filipina-dipecat-karena-gagal-cegah-pemenggalan-sandera/> diakses pada 20 juli 2017

²⁴<http://beritaonline24.com/begini-kronologis-lengkap-pembebasan-10-wni-yang-di-sandera-oleh-kelompok-abu-sayyaf/> diakses pada 20 juli 2017

²⁵<https://dunia.tempo.co/read/news/2017/05/27/118879175/isis-abu-sayyaf-dan-maute-mau-dirikan-provinsi-isis-di-mindanao> diakses pada 20 juli 2017

²⁶<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141017171715-106-6777/abu-sayyaf-teroris-di-selatan-Filipina/> diakses pada 20 juli 2017

Negosiasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Senantiasa melibatkan orang.
2. Memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik.
3. Menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu.
4. Hampir selalu berbentuk tatap muka langsung.
5. Menyangkut hal-hal di masa depan.
6. Berujung pada kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak.

Diplomasi dan negosiasi pun dilakukan oleh menteri luar negeri Indonesia kepada pemerintah Filipina, namun tidak ada respon yang positif dari Negara tersebut. Kemudian pemerintah mengundang pihak ketiga untuk melakukan negosiasi terhadap pemerintah Filipina. Pihak ketiga ini merupakan orang Indonesia dan mempunyai pengalaman ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf Filipina selama 12 tahun. Otomatis yang ditunjuk sebagai pihak ketiga sudah memahami bahasa yang ada di pemerintah Filipina khususnya kelompok Abu Sayyaf Filipina. Negosiasi pun dilakukan dengan komunikasi berbahasa melayu oleh pihak ketiga. Namun negosiasi yang dilakukan tidak semena-mena WNI bisa dibebaskan akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Syarat tersebut yaitu kelompok Abu Sayyaf Filipina meminta uang untuk penebusan WNI tersebut dengan jumlah 50 Juta peso setara dengan 15 miliar Rupiah. Pemerintah menyetujui permintaan syarat tersebut dan pada akhirnya WNI bebas dari sandera kelompok Abu Sayyaf Filipina.²⁷

Di samping itu, faktor lain yang menghambat untuk terlaksananya JPS secara menyeluruh adalah Mindanao masih dalam keadaan yang tidak diakui oleh Filipina. Maka dari itu, ASG tetap dapat eksis di sana dengan dalih mendirikan Negara Islam.

Dalam kasus ini implementasi *Joint Press Statement* antara Indonesia dan Filipina khususnya dalam memerangi aksi Abu Sayyaf Group telah dilakukan melalui upaya-upaya tingkat penyelesaian serta pengembangan infrastruktur yang mendukung. Terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan terorisme bahwa pertama, langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror di kawasan khususnya Asia Tenggara, dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat merupakan skenario yang dipaksakan oleh Negara-Negara maju kepada Negara lemah dalam bidang politik, ekonomi, militer dan teknologi. Kedua, adanya trauma bahwa aparat keamanan dan sistem hukum untuk menangani terorisme untuk kepentingan kelompok penguasa dalam rangka mengembalikan kekuasaan.

Kurangnya Dukungan Masyarakat Terhadap Pemerintah Filipina Dalam Menanggulangi Ancaman Abu Sayyaf Group. (Permasalahan Birokrasi)

Permasalahan ini sudah ada sejak Filipina masih dipimpin oleh Presiden Arroyo, ketika Filipina dalam melihat kelompok terorisme lebih memandang hal tersebut sebagai sebuah perang dibandingkan sebuah permasalahan hukum dan tatanan Negara yang memerlukan satuan tugas kepolisian yang lebih tepat. Hal itu dibuktikan dengan gagal Filipina mengambil momentum Operasi Balikatan antara Filipina dan Amerika Serikat yang kemudian gagal dalam menyatukan peranan masyarakat Filipina dalam memberantas terorisme. Dikerahkannya Tentara Nasional Filipina kepada Polisi Nasional Filipina namun dengan kebijakan yang inkonsistensi dan cenderung reaktif dibandingkan cepat tanggap (*preemptive strike*).²⁸ Di samping itu, kampanye dalam “war on terrorism” milik Filipina dalam kancah internasional juga tidak begitu gencar. Birokrasi Filipina dalam menangani

²⁷http://unhas.ac.id/aihi7/wp-content/uploads/2017/04/Prosiding_VENNAS7_fin al.pdf hal. 85-86 diakses pada 16 agustus 2017

²⁸Eusaquito P. Manalo. *The Philippine Response to Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. Naval Postgraduate Thesis. 2004. Hal. 55.

terorisme tidak memadai dalam ranah pengetahuan sehingga dalam pelaksanaannya, penanggulangan terorisme di luar kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan tersebut.

Kegagalan Filipina dalam operasi Balikatan 02-1 pada tahun 2002 dikarenakan kebijakan Filipina sendiri yang membuatnya menjadi kompleks. *Joint Philippine-U.S* yang diisi dengan operasi Balikatan 02-1 tidak berhasil karena Filipina hanya mengizinkan militer AS hanya sekadar untuk pelatihan dan penasihat perang, tidak diizinkan dalam kontak senjata namun diperbolehkan berada di garis depan sebagai advisor atau penasihat ketika kontak senjata terjadi. Di saat yang bersamaan, daerah Selatan Filipina merupakan poros bagi Jamaah Islamiyah dan Moro Islamic Liberation Front yang terus melakukan perekrutan.²⁹

Permasalahan internal Filipina adalah mengedepankan dan memutakhirkan perlengkapan perang terhadap teroris namun diiringi dengan kurangnya strategi dan perencanaan yang baik. Di samping itu, salahsatu penopang Filipina dalam memerangi terorisme adalah kebijakan Negara Filipina dalam pemberantasan kelompok teroris. Dalam ranah kebijakan ini, Filipina selalu gagal dalam membentuk suatu korelasi dalam ranah Cara/*Means* (polisi, undang-undang, perlengkapan) dan ranah Metode (Penggunaan *Means*).³⁰

Jika dilihat pada masa sekarang, Filipina masih saja demikian dengan tidak mengizinkan TNI untuk berkontak langsung dengan ASG dengan dalih menolak intervensi asing meski pun sudah ditandatangani Nota Kesepahaman JPS.

Dalam kasus ini kepedulian masyarakat terhadap kewaspadaan tentang teroris masih lemah. Kemampuan aparat untuk mendeteksi, menangkal, mencegah, menangkap tokoh teroris belum optimal. Guna merumuskan konsepsi pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam

rangka menjaga keamanan di Asia Tenggara dan kedaulatan NKRI secara komprehensif dan integral. Aksi teror tidak mengenal deskriminatif target, membuat keharusan membangun sistem keamanan terhadap manusia dan obyek vital baik militer maupun non militer di banyak Negara. Gangguan terhadap kehidupan demokrasi, roda pemerintahan tidak berjalan lancar, pemerintah yang lemah bisa jatuh. Berbagai kerja sama internasional dikembangkan untuk mendesak langkah kooperatif dalam melawan terorisme. Perang melawan terorisme, perdebatan politik terjadi disejumlah Negara. Antara upaya membangun sistem keamanan dengan pembatasan kebebasan di satu sisi dan antara sistem keamanan nasional dengan multi nasional di sisi lainnya. Lepas dari pertarungan politik dalam dan luar negeri, sentimen baru melawan terorisme telah membuka babak baru perkembangan arah politik dunia.

KESIMPULAN

Kehadiran teroris yang beroperasi tampaknya menjadi sorotan bagaimana tidak amannya jalur maritim. Begitu juga dengan batas maritim antara Indonesia dan Filipina menjadi salah satu faktor kurangnya keamanan khususnya pada perbatasan kedua Negara sehingga menjadi jalur terjadinya kejahatan perbatasan. Kerjasama Indonesia dan Filipina juga membawa kedua Negara ini kedalam suatu hubungan yang baik, sehingga menyebabkan semakin eratnya hubungan bilateral kedua Negara, baik dalam hal keamanan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, dan kerjasama dibidang yang lainnya.

Tindakan terorisme merupakan sebuah tindakan yang terencana, dan terorganisir, serta berlaku dimana saja, dan kepada semua orang. Tindakan teror bisa dilakukan oleh siapapun dengan bermacam cara untuk melakukan tindakan tersebut,

²⁹*Ibid.* Hal. 61.

³⁰*Ibid.* Hal. 72.

ada 2 tindakan teror yaitu fisik dan non fisik. Tindakan teror fisik biasanya berakibat pembunuhan, hingga pengeboman dan lainnya. Sedangkan bentuk teror non fisik bisa terjadi dengan penyebaran isu, penyanderaan, menakut-nakuti dan lainnya. Selain berakibat pada manusia, terorisme juga akan berdampak pada ekonomi, politik, dan kedaulatan sebuah Negara. Tidak terorisme sulit terdeteksi dan akan berdampak besar bagi suatu Negara sehingga suatu Negara harus mendapatkan solusi pencegahan dan penanggulangan yang serius baik pemerintah ataupun masyarakat didalamnya.

Negara Indonesia dan Filipina adalah Negara berkembang di Asia tenggara sebagai salah satu kawasan yang belum memiliki kestabilan, khususnya didalam konteks politik, ekonomi, dan keamanan. Ketidakstabilan tersebut menyebabkan Negara-Negara berkembang lebih rentan terhadap ancaman yang datang dari luar maupun dalam negeri. Indonesia dan Filipina merupakan dua Negara kepulauan dan juga merupakan dua Negara berkembang yang terdapat di Asia tenggara. Kedua Negara yang dari segi geografis ini saling berbatasan memiliki sebuah kemiripan yaitu masih seringnya terjadi konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Tidak hanya itu di kedua Negara ini terdapat kelompok radikal yang memiliki keterkaitan satu sama lain dapat mengancam kedaulatan mereka. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kedua Negara melakukan pendekatan dengan cara membentuk kerjasama bilateral dalam bidang keamanan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kawasan yang stabil dan aman.

Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, Negara, dan masyarakat internasional. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan

digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Dikenal sebagai kelompok yang terbesar di Mindanao pengaruh kebudayaan moro terasa dominan di Filipina Selatan. Dilihat dari letak geografisnya, Moro tidak saja berfungsi sebagai pintu masuk bagi kebudayaan-kebudayaan dari luar, baik dari selatan maupun dari timur benua asia, sekaligus sebagai gerbang jalur perdagangan, dengan dunia luar. Bangsa moro dikenal sebagai bangsa yang keras dan tidak kenal menyerah dan dilatarbelakangi oleh faktor agama yang sama yaitu islam yang muncuk kepermukaan membuat solidaritas bangsa Moro makin kuat dalam menentang pemerintah Filipina yang menganakritikkan mereka di banding wilayah-wilayah lain di Filipina, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang-bidang lainnya.

Permasalahan keamanan yang terjadi di daerah Filipina Selatan, dimana di daerah tersebut terdapat gerakan *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang berusaha memisahkan diri dari Filipina yaitu Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf Group merupakan sebuah kelompok militan yang beroperasi di Filipina Selatan dan mempromosikan pendirian sebagai suatu Negara Islam yang merdeka di Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Abu Sayyaf Group berdiri pada awal tahun 1990-an. Abu Sayyaf Group terlibat dalam berbagai tindak kekerasan seperti pemboman, penculikan, pembunuhan, dan pemerasan. Pada tahun 2016 Abu Sayyaf menyandera 7 WNI di perairan Malaysia dan membebaskan 4 dari 7 WNI.

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina untuk mengadakan rapat terkait masalah tersebut pada tanggal 1 sampai 2 April 2016. Pertemuan yang berlangsung di Manila tersebut akhirnya menghasilkan 4 point penting, yaitu : Mengintensifkan komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan sandera WNI Menekankan kembali mengenai pentingnya keselamatan ke-10 WNI tersebut dan menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang sejauh ini telah diberikan oleh otoritas Filipina dalam rangka koordinasi pelepasan sandera dan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Pihak pemerintah Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah Filipina secara terpisah untuk membahas penanganan kasus tersebut.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah bahwa pihak Filipina berkomitmen penuh atas upaya melakukan yang terbaik dalam pembebasan para sandera. Selama proses negosiasi, desakan demi desakan mengenai kekuatan militer terus bergema, bahkan pasukan TNI juga telah disiapkan di sekitar wilayah Kalimantan menunggu perintah jika adanya pelaksanaan kekuatan militer. Hal ini juga terlihat pada bentuk latihan bersama yang dilakukan di wilayah Kalimantan. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa dengan penggunaan kekuatan militer akan berhasil lantaran hal itu terjadi di luar negeri, bahkan Indonesia sendiri telah meminta izin untuk masuk tanpa memaksa ke wilayah Filipina. Indonesia pun siap menunggu akan hasil yang dilakukan oleh Manila dan siap melakukan apapun apabila dibutuhkan bantuan. Namun permintaan itu ditolak oleh pihak Filipina dengan alasan konstitusi Filipina tidak mengizinkan kekuatan militer Negara lain masuk ke wilayah mereka tanpa ada perjanjian terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anak Agung Banyu Perwita & M, Nyanyan, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Alfian dkk. 1986. *Latar Belakang Terbentuknya ASEAN*. Jakarta: Seknas ASEAN Deplu RI
- Alam, E. S. 2006. *Menyibak Tabir WNI*. Davao City: konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City
- Butweel, Richard, 1989, *Negara dan Bangsa Asia*, Jilid 3 Grolier Internasional Inc, Jakarta: PT. Widyadara
- Banlaoi, Rommel C., 2008, "Al Harakatul Al Islamiyah: Essays on the Abu Sayyaf Group," *Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research*
- Barry Buzan, Ole Weaver and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998) hal. 21, dikutip dari J. Soedjati Djihadono, dkk, *Global Jurnal Politik Internasional: Dinamika Keamanan Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, thn 2001
- Cagoco-Guam, Rufa. Mindanao 2004: *Conflicting Agendas, Stumbling Blocks and Prospects Towards Sustainable Peace*. Dalam buku *Searching for Peace in Asia Pacific: an Overview of Conflict prevention and peace building activities*. United States: Lynne Rienner Publisher, inc.
- Cesar A. Majul, *The Moro Struggle in the Philippines*, *Third World Quarterly* Vol. 10, No. 2, April 1988
- Dam, Sjamsumar dan Riswandi, 1995, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia
- Ernest Satow, *Guide to Diplomacy Practice*, London, 4th edition, 1957

- Holsti, K.J, 1988, *Politik Internasional, kerangka untuk Analisis*, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga
- Islam, Syed Siratul, 2005, *The Politics of Islamic identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson Learning
- Jackson, Robert dan Sorensen, George, 2005, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, 1997, *Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey*. New York: Addison-Wesley Educational Publisher Inc.
- Jack C. Plano & Roy Olton, 1990, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: CV Abardin,
- Lacquer, Walter, *Terrorism*, (Little, Boston 1977)
- Lisssa Andayani, 2009, *Kepentingan Rusia Memilih Jepang sebagai Partner Pembangunan Jalur Pipa Minyak Trans-Siberia (Taishet-Nakhodka Line) 1999-2004*, Universitas Riau
- Muna, M. Riefqi. 2002. *Grey Areas, Kewenangan dan Peran Politik Elit*. Jakarta: ProPatria Institute, 17 Oktober
- Majul, Cesar A, 1989, *Dinamika Islam Filipina*, Jakarta: LP3S,
- Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES,
- Poetranthro, Tri, *Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI*, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan
- Police, P. N. 2006. *Handbook on PNP : Three-tiered defense system against terrorism*
- Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relation Theory: Realism, Pluralis, Globalism*, (New York: Macmillan Publishing Company, (1993), Hal. 48, dikutip dari J. Soedjati Djiwandoro, dkk, *Jurnal Politik Internasional Dinamika Keamanan Internasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, thn 2001
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Suradji, Adjie, 2005, *Terorisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Susetyo, Heru, *The Journal of a Muslim Traveler, Sebuah Jurnal Melintasi Asia, Amerika, Eropa, dan Australia*, Jakarta: PT: Lingkar Pena Kreativa
- Sholahuddin, 2011, *NII sampai JI, Salafy Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bamb
- Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, 1990, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*. Bandung: Putra Abardin
- Jurnal dan Artikel**
- Ben Golder and George Williams, "What is 'Terrorism'? Problems of Legal Definition," *UNSW Law Journal* Vol. 27(2) (February 2003): 286
- Dirkersin Kemhan, "Kerja sama Pertahanan", Mei 2011
- Makmur Keliat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129) ISSN 1410-4946, *Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia*
- Nuechterlein, Donald E., 1979. *National Interest A New Approach*, *Orbis* Vol. 23 No. 1 (Spring)
- Setiawan, Aria Aditya, 2005, *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Masalah Terorisme di Asia Tenggara*, *Mundus*, Volume 2, No.1, Juni 2005
- Skripsi**
- Oktari, Wulan Dwi. *Pengaruh Kerjasama Indonesia dan Filipina Dalam Mengatasi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Perairan Kedua Negara 2005 – 2010*
- Skripsi Tri Arthin Marina Ruagadi, *Dampak Hubungan Indonesia dan*

- Amerika Serikat terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia. Makasar: Universitas Hasanuddin. 2011
- Website**
- Akar terorisme yang mengatasnamakan Agama
<http://www.nu.or.id/post/read/77358/akar-terorisme-yang-mengatasnamakan-agama>
- Ancaman dan Optimisme Keamanan di tahun 2017
<https://news.detik.com/kolom/d-3381399/ancaman-dan-optimisme-keamanan-di-tahun-2017>
- Apa hubungan antara Abu Sayyaf dan ISIS?
<https://news.idntimes.com/world/ri-zal/ngeri-ini-hal-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-abu-sayyaf-1/full>
- Abu Sayyaf men abduct school principal in Basilan
<http://newsinfo.inquirer.net/590576/abu-sayyaf-men-abduct-school-principal-in-basilan>
- Abu Sayyaf teroris di selatan Filipina
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141017171715-106-6777/abu-sayyaf-teroris-di-selatan-filipina/>
- Begini kronologis lengkap pembebasan 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf
<http://beritaonline24.com/begini-kronologis-lengkap-pembebasan-10-wni-yang-di-sandera-oleh-kelompok-abu-sayyaf/>
- Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Hubungan Internasional
http://unhas.ac.id/aiiii7/wp-content/uploads/2017/04/Prosiding_VENNAS7_final.pdf
- Charles Comer “*The Parting of the Sulawesi Sea : How U.S. strategy in the region is slowly transforming the multinational environment in Southeast Asia’s Terrorist Transit Triangle*”
<http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/SulawesiSea.pdf> diakses 8 september 2016
- Conceptualization of Terrorism
https://books.google.co.id/books?id=_sPG4EP0ut8C&pg=PA91&lpq=PA91&dq=Jack+Gibbs,+%E2%80%9DDefinition+of+Terrorism%E2%80%9D&source=bl&ots=5wFCqCw6K0&sig=ichO8OAy7dTUjcSsN_O-0lvvLH8&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiioJe25qPUAhXDRo8KHfEjBtUQ6AEIPzAD#v=onepage&q=Jack%20Gibbs%2C%20%E2%80%9DDefinition%20of%20Terrorism%E2%80%9D&f=false
- Eusaquito P. Manalo. *The Philippine Response to Terrorism: The Abu Sayyaf Group*. Naval Postgraduate Thesis. 2004 di
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wmlI7HFdKPLoJ:https://fas.org/irp/world/para/manalo.pdf+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>
<http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6159/>
- <http://www.pvtr.org/pdf/Legislative%20Response/ASEAN%20Convention%20on%20Counter%20Terrorism-Analysis%5B1%5D.pdf>
- <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jd4lRxK-60MJ:etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/94292/potongan/S1-2016-264875-Introduction.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Invasi As ke Irak tahun 2003
http://id.netlog.com/d_luv17/blog/blogid=79676
- Indonesia dan Malaysia bekerja sama bebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf
<http://jakartagreater.com/indonesia-dan-malaysia-bekerja-sama-bebaskan-sandera-dari-kelompok-abu-sayyaf/>
- Isis Abu Sayyaf dan maute ma dirikan provinsi isis di Mindanao

- <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/05/27/118879175/isis-abu-sayyaf-dan-maute-mau-dirikan-provinsi-isis-di-mindanao>
- Jenderal Filipina dipecat karena gagal cegah pemenggalan sandera
<https://jakartagreater.com/jenderal-filipina-dipecat-karena-gagal-cegah-pemenggalan-sandera/>
- Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan
http://www.academia.edu/6791659/Kelompok_Abu_Sayyaf_dan_Radikalisme_di_Filipina_Selatan
- Kisah pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf pada 2005
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160410_indonesia_kisah_pembebasan_sandera2005
- Kemampuan 3 pasukan elit TNI buat bebaskan sandera di Filipina
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kemampuan-3-pasukan-elite-tni-buat-bebaskan-sandera-di-filipina.html>
- Kapal Indonesia kembali dibajak ini kata menkopolkukam
<https://nasional.sindonews.com/read/1101574/14/kapal-indonesia-kembali-dibajak-ini-kata-menkopolkukam-1460791002>
- Leandro R. Mendoza “*Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting*”
www.apec-tptwg.org/cn/.../Transportation%20Security%20Philippines diakses pada 8 september 2016
- Luhut negosiasi dai opsi terbaik pembebasan sandera di Filipina
<http://nasional.kompas.com/read/2016/07/14/19441531/luhut.negosiasi.jadi.opsi.terbaik.pembebasan.sandera.di.filipina>
- Luhut pemilik kapal yang di bajak sedang berunding
<http://nasional.kompas.com/read/2016/03/29/18115141/Luhut.Pemilik.Kapal.yang.Dibajak.Sedang.Berunding>
- Meneropong Konflik Separatisme Moro
http://komapo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Abupati-pidato-camat-tonton-video-porno&catid=25%3Aberita&Itemid=37
- Menlu RI: Filipina segera selamatkan WNI dari Abu Sayyaf
<http://www.viva.co.id/berita/dunia/756530-menlu-ri-filipina-segera-selamatkan-wni-dari-abu-sayyaf>
- Overview <http://www.pnp.gov.ph/about-us/overview>
- Perkembangan Terorisme
<https://damailahindonesiaku.com/terorisme/perkembangan-terorisme/>
- Perjanjian damai akhir cerita perjuangan bangsamoro.
<http://syamina.org/syamina21-Perjanjian-Damai-Akhir-Cerita-Perjuangan-Bangsamoro-.html>
- Pembebasan 10 sandera WNI di Filipina: Diplomasi tanpa bedil
<https://news.detik.com/berita/3201168/pembebasan-10-sandera-wni-di-filipina-diplomasi-tanpa-bedil>
- Philippines, A. F (2010). Internal Peace and Security Plan.
<http://www.afp.mil.ph/pdf/IPSP%20Bayanihan.pdf>
- Siapa sebenarnya abu sayyaf bapaknya
<http://www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html>
- The 2010 Census of Population and Housing Reveals the Philippine Population at 92.34 Milion
<http://www.census.gov.ph/content/2010-census-population-and-housing-revealsphilippine-population-9234-million>
- UU 34/2004 Tentara Nasional Indonesia dalam Kompilasi Hukum Pertahanan
<https://eclis.id/kompilasi/hukum-pertahanan/uu/nomor-34-tahun-2004>

Umar Patek dikabarkan ikut melobi Abu Sayyaf
<http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/04/09/o5cy8a1-umar-patek-dikabarkan-ikut-melobi-abu-sayyaf>